

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Azis, Asmaeny & Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamidi, Jazim & Kemilau Mutik. 2011. *Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan PERDA*, Yogyakarta: Total Media.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Adya Bakti.
- Patterson, Samuel C. 2001. *Parliaments and Legislatures Series*. Columbus: Ohio State University Press.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 2013. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Bogor: Politea.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugianto. 2018. *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Taib, Mukhlis. 2017. *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Penulis PSHK. 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Tim Penyusun Kementerian Hukum dan HAM. 2010. *Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law*.

Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

## **Jurnal**

Anggono, Bayu Dwi. 2020. *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9/No. 1.

Aziz, Machmud. 2010. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 7/No. 5.

Burton, Richard. 2020. *Assesment of Certain Justice Towards Tax Omnibus Law in Indonesia*. Vol. 7/No. 5.

Busroh, Firman Freaddy. 2017. *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*. Jurnal Arena Hukum. Vol.10/No.2.

Dodek, Adam M. 2017. *Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations*. Ottawa Law Review. Vol. 48/No. 1.

Fadli, Muhammad. 2018. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Legislasi Indonesia*. Vol. 15/No. 1.

Fitryantica, Agnes. 2019. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*. Vol. 6/Ed. III.

Gluck, Abbe R., et.al. 2015. *Unorthodox LawMaking, Unorthodox Rulemaking*. Columbia Law Review. Vol. 115/ No. 1789.

Krutz, Glen S. 2001. *Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*. Columbus: Ohio State University Press.

\_\_\_\_\_. 2000. *Getting around gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity*. Legislative Studies Quarterly. Vol. 25/No. 24.

\_\_\_\_\_. 2001. *Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress*. American Journal of Political Science. Vol. 45/No. 1.

Mahfud MD, Moh. 2009. *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum, Vol. 16/No. 4.

Massicotte, Louis. 2013. *Omnibus Bills in Theory and Practice*. Canadian Parliamentary Review. Vol. 36/No. 1 (Spring).

- Nugroho, Setio Supto. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas.
- Ruud, Millard H. 1958. *No Law Shall Embrace More Than One Subject*. Minnesota Law Review. Vol. 42/No. 3.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. 2004. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum. Vol. 11/No. 27.
- Suhayati, Monika & Shanti Dwi Kartika. 2019. *Agenda DPR RI Tahun 2019–2024: Carry-over RUU dan Omnibus Law*. Vol. 1/No. 4.

### Sumber Lainnya

- Anggota DPR RI Periode 2019-2024. <http://www.dpr.go.id/anggota>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 10:44 WIB.
- Anonim. “*Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024*”. <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 Pukul 12:10 WIB.
- Anonim. “*Persiapan Penyusunan Omnibus Law Tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM*”. <https://bphn.go.id/news/2019111204315750/Persiapan-Penyusunan-Omnibus-Law-tentang-Cipta-Lapangan-Kerja-dan-Pemberdayaan-UMKM>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020 Pukul 01:28 WIB.
- Anonim. “*RUU Cipta Kerja: Awal Langkah Penuh Masalah*”. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/ruu-cipta-kerja-awal-langkah-penuh-masalah/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 Pukul 23:12 WIB.
- Anonim. “*Study Paper Possible Use Of The Omnibus Legislative Technique For Implemetation Of Vietnam's WTO Obligations and Commitments*”. Institute of Law Science The World Bank, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. “*UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*”. <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2020 Pukul 09:30 WIB.
- Attamimi, A. Hamid S. “*Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) dan Pengembangan Pengajarannya di Fakultas Hukum*”. Makalah Hukum dan Pembangunan (dibawakan dalam Diskusi Mengenai Kemungkinan Masuknya Ilmu Perundang-undangan Dalam Kurikulum Fakultas Hukum pada Pertemuan Dekan-dekan Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia di bawah Konsorsium Ilmu Hukum). 20—21 Oktober 1989.
- Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi Dalam Rangka Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 Tanggal 2 Desember 2019.



- Catatan Rapat Badan Legislasi Dengan 11 (sebelas) Menteri Tanggal 14 April 2020. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200528-032328-9707.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2020 Pukul 15:41 WIB.
- CNN Indonesia. “*Masuk dalam Satgas, Anies Belum Cek Draf Omnibus Law Ciptaker*”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219183148-32-476208/masuk-dalam-satgas-anies-belum-cek-draf-omnibus-law-ciptaker>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020 Pukul 23:14 WIB.
- CNN Indonesia. “*Airlangga Sebut RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rampung*”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203124437-532-471103/airlangga-sebut-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-rampung>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2020 Pukul 08:32 WIB.
- Daftar Anggota Badan Legislasi. <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Badan-Legislati>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 10:42 WIB.
- Hidayat, Rofiq. “*Kekhawatiran Maria Farida Terkait Omnibus Law*”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 Pukul 23:10 WIB.
- Library of Congress. “*Compromise of 1850: Primary Documents in American History*”. <https://guides.loc.gov/compromise-1850/introduction>. Diakses pada tanggal 5 April 2020 Pukul 10:14 WIB.
- Lingga, Murti Ali. “*Setelah Dilantik, Ini 5 Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'arif*”. <https://money.kompas.com/read/2019/10/20/194153726/setelah-dilantik-ini-5-prioritas-kerja-pemerintahan-jokowi-maaruf?page=all>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 Pukul 12:14 WIB.
- Live Streaming TV Parlemen, *Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah*, 14 April 2020.
- Maharani, Tsarina. “*DPR Terima Draf dan Surpres RUU Omnibus Law Cipta Kerja*”. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/15570281/dpr-terima-draf-dan-surpres-ruu-omnibus-law-cipta-kerja>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2020 Pukul 13:19 WIB.
- Merriam Webster Dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bill#legalDictionary>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020 Pukul 16:31 WIB.
- Merriam-Webster Dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/law>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 13:02 WIB.
- Nugraheny, Dian Erika. “*Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law*”. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/22/15505911/dinilai-tak-demokratis-sejumlah-negara-disebut-kapok-pakai-omnibus-law>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 Pukul 10:31 WIB.
- RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (*Omnibus Law*), <http://dpr.go.id/uu/detail/id/442>, 22 Juni 2020.

- Sari, Haryanti Puspa. “DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas Termasuk Omnibus Law”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/09432411/dpr-gelar-rapat-paripurna-sahkan-50-ruu-prolegnas-prioritas-termasuk-omnibus>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2020 Pukul 13:12 WIB.
- Thea, Ady. “Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law”. <https://law.ui.ac.id/v3/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 14:07 WIB.
- Wahyono. “Penerapan Undang-Undang ‘Sapu Jagad’ Omnibus Law di Dunia”, <https://ekbis.sindonews.com/read/1513270/33/penerapan-undang-undang-sapu-jagad-omnibus-law-di-dunia-1580466285>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020 Pukul 10:59 WIB.
- Yegin Ciftci Attorney Partnership. “Turkey Introduces New Omnibus Bill”, [https://www.yeginciftci.av.tr/content/site-ycap/en/publications/recent-publications/Turkey-Introduces-New-Omnibus-Bill/\\_jcr\\_content/parsys\\_article/download/file.res/Client%20Briefing%20%20Law%20No%207161%20\(Omnibus%20Bill\)%20January%202019.pdf](https://www.yeginciftci.av.tr/content/site-ycap/en/publications/recent-publications/Turkey-Introduces-New-Omnibus-Bill/_jcr_content/parsys_article/download/file.res/Client%20Briefing%20%20Law%20No%207161%20(Omnibus%20Bill)%20January%202019.pdf). Diakses pada tanggal 20 Maret 2020 Pukul 10:56 WIB.

